

DINAMIKA PERUBAHAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN

Sainudin Latare

Abstract

Dinamika perubahan pembangunan masyarakat pedesaan lebih terfokus pada persoalan apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri, yang kemudian pihak-pihak terkait dapat mencari solusi sehubungan dengan pemecahan masalahnya. Beberapa persoalan yang terurai dalam tulisan ini di antaranya : *Pertama*, Kebijakan pemerintah tidak hanya berada pada tataran *Top-down Planning* atau perencanaan pembangunan yang lebih merupakan inisiatif pemerintah namun seharusnya *Bottom-up Planning*. Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat pedesaan. *Kedua*, Hakikat fungsi dan potensi masyarakat pedesaan berdasarkan Kepres pasal 6 akan Nampak betapa semakin luas dan menyeluruhnya fungsi dari lembaga ketahanan masyarakat pedesaan, antara lain: (1) Menanamkan pengertian dan kesadaran; (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; (3) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan; (4) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan kualitas keluarga; (5) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat dalam pembangunan, dan (6) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap. *Ketiga*, Problematika pembangunan masyarakat pedesaan, W. Brand menulis Negara-negara yang sedang berkembang miskin karena: produktivitas tanahnya rendah; kekurangan modal; taraf pendidikannya rendah; kekurangan kepemimpinan untuk mendorong kemajuan ekonomi; dan di Indonesia dapat ditambahkan dengan kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa.

Kata Kunci : *Perubahan Pembangunan Pedesaan "Bottom-up Planning*

Pendahuluan

Menyikapi berbagai persoalan tentang pembangunan desa tentunya tidak akan terselesaikan jika hanya dalam proses diskusi, namun perlu kiranya tindakan sehingga bisa merubah pandangan pola pikir masyarakatnya. Selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala "*proyek*" saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan

sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa. Apa sesungguhnya pembangunan desa?. Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam

kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol "*Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)*". Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa.

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*.

Top-down Planning. Perencanaan pembangunan yang lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau dapat melibatkan masyarakat desa di dalamnya. Namun demikian, orientasi

pembangunan tersebut tetap untuk masyarakat desa. *Bottom-up Planning*. Perencanaan pembangunan dengan menggalipotensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat desa. Dimana masyarakat desa diberi kesempatan dan keleluasan untuk membuat perencanaan pembangunan atau merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Masyarakat desa dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat desa dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan desa.

Konsep Umum Masyarakat Pedesaan

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah pedesaan yang manasecara structural dana administrasi memiliki peranannya yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara, sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani/agraris, namun sebenarnya mata pencaharian penduduk sangat dipengaruhi oleh factor alam yang ada, berdasarkan mata pencahariannya desa dapat dibedakan menjadi: *desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industry* dan lain sebagainya, namun cirikhas dari desa adalah sifat kehomogenan yang ada pada sistem mata pencaharian penduduknya, walaupun ada beberapa yang bermata pencaharian berbeda (ex, pedagang, biro jasadll) namun secara nyata hanya satu jenis mata pencaharian yang menonjol dan menjadi cirikhas dari desa tersebut. Corak kehidupan di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. masyarakat merupakan *gemeinschaft* yang memiliki unsur gotong royong yang kuat factor lingkungan geografis memberi pengaruh juga terhadap gotong royong diantaranya: (1) Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi

kepada penduduk. (2) Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama para petani. (3) Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi dan banjir.

Selain dari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah unsur-unsur desa, unsur-unsur tersebut yaitu: (1) Daerah, dalam artian tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat. (2) Penduduk, adalah hal yang memiliki jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat. (3) Tata kehidupan, dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa atau total society. Unsur lain yang termasuk unsur desa yaitu, unsur letak. Letak suatu desa umumnya selalu jauh dari kota atau pusat kota. Peninjauan kedesa-desa atau perjalanan kedesa sama artinya dengan menjauhi kehidupan dikota dan lebih mendekati daerah-daerah yang otonom dan sunyi. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan yang lebih banyak dari pada desa yang ada dipedalaman. Dari uraian diatas, maka sangatlah beralasan jika Soetarjo Karto Hadikusumo mendefinisikan desa sebagai satuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.

Fungsi dan Potensi Desa

Pertama, dalam hubungannya dengan kota maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai daerah pemberi bahan makanan pokok baik yang berasal dari nabati maupun hewani. *Kedua*, desa ditinjau dari segi potensi ekonomi berfungsi sebagai

lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. *Ketiga*, dari segi kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa agraris, manufaktur, industri, nelayan dan sebagainya. Menurut Sutopo Yuwono salah satu peranan pokok desa terletak di bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan daerah produksi pangan dan komoditi ekspor. Peranan yang vital menyangkut produksi pangan akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali bahkan bersifat vital, dan nampaknya jika kita meninjau keputusan presiden pada pasal 6 akan nampak betapa semakin luas dan menyeluruhnya fungsi dari lembaga ketahanan masyarakat desa, antarlain: (1) Menanamkan pengertian dan kesadaran. (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. (3) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan. (4) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan kualitas keluarga. (5) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat dalam pembangunan. (6) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Untuk menghadapi hal tersebut, kita perlu meninjau potensi desa yang ada agar pengembangan desa dapat serasi dengan kondisi desa. Desa mempunyai potensi fisis dan non fisis, potensi fisis meliputi tanah, air, iklim, ternak dan manusia. Potensi nonfisis meliputi: masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotongroyong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian, lembaga-lembaga sosial, aparat dan pamong desa yang kreatif

dan disiplin.

Modernisasi dan Permasalahannya

Dalam studi literatur telah dibincangkan mengenai luntarnya gotong-royong berkenaan dengan terbukanya masyarakat pedesaan terutama pengaruh dunia luar, yang dimaksud dengan dunia luar ialah Negara – Negara maju dengan teknologi yang modern. Sebagai tujuan dari modernisasi desa dapat dikemukakan beberapa hal antara lain; *pertama*, modernisasi dapat memberikan gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan sikap monotonik dari kehidupan di desa, *Kedua* modernisasi desa dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa sehingga dapat menahan arus urbanisasi. *Ketiga* modernisasi yang berarti suatu usaha meningkatkan bidang pendidikan secara merata. *Keempat* modernisasi dibidang pengangkutan akan secara berangsur menghilangkan sifat isolasi desa. *Kelima* modernisasi merupakan tumpuan dari pembangunan teknologi pedesaan dan dalam proses pembangunannya warga desa dapat diikuti sertakan. Oleh karena itu, jenjang teknologi yang akan diterapkan di Indonesia dapat dikembangkan asal saja kesemuan nyaitu dapat dijaga dan tidak merugikan masyarakat desa, Terlepas dari modernisasi yang ada, ternyata di daerah desapun menyisakan permasalahan yang bersifat faktual, dan secara umum. Permasalahan – permasalahan yang erat kaitannya dengan desa dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain: dari segi masyarakatnya, dari segi pemerintah desanya, dari segi geografisnya, serta dari segi kelembagaan.

Faktor – factor Pembinaan Masyarakat Desa

Tentunya bahwa masalah pembinaan juga sangat menentukan

keberhasilan dan kegagalan suatu program masyarakat desa sehingga kedudukannya tidak kalah penting dengan penelitiannya. Keberhasilan pembinaan masyarakat dipedesaan tergantung pada beberapa factor yaitu: (1) para Pembina. (2) masyarakat yang di bina. (3) daerah pemukiman penduduk. (4) materi dan objek pembinaan. (5) cara pembinaan. (6) pembiayaan yang di sediakan

Walaupun nampaknya aspek atau masalah pembinaan masyarakat desa ini cukup sederhana namun ternyata lingkungan permasalahannya cukup banyak. Masalah – masalah yang dihadapi tidak hanya meliputi masalah manusianya, tetapi juga sarana dan prasarannya.

Kehidupan Sosial Masyarakat Pedesaan

Corak kehidupan masyarakat didesa dapat dikatakan masih homogeny dan pola interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga. Serta hal yang sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-motif sosial. Interaksi social selalu di usahakan supaya kesatuan social (socialunity) tidak terganggu, konflik atau pertentangan social sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai terjadi. Prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial pada masyarakat pedesaan. Kekuatan yang mempersatukan masyarakat pedesaan itu timbul karena adanya kesamaan – kesamaan kemasyarakatan, seperti kesamaan adat kebiasaan, kesamaan tujuan dan kesamaan pengalaman.

Sosial kemasyarakatan desa ditandai dengan pemilikan ikatan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari masyarakat dimana ia hidup dan dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakat atau anggota-anggota masyarakat. Karena beranggapan sama - sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai, menghormati, mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Oleh karena masyarakat pedesaan mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk kerja sama dalam masyarakat sering diistilahkan dengan gotong-royong dan tolong-menolong. Pekerjaan gotong-royong sekarang lebih populer dengan istilah kerja bakti. Sedangkan mengenai macamnya pekerjaan gotong-royong atau kerja bakti itu ada dua macam, yaitu: (1) Kerjasama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri. (2) Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang inisiatifnya tidak timbul dari masyarakat itu sendiri, berasal dari luar.

Kerja sama jenis pertama biasanya sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya bagi mereka, sedangkan jenis yang kedua biasanya kurang difahami kegunaannya. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat pedesaan yang agraris dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat yang tentram, damai dan harmonis sehingga dijadikan tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian dan keruwetan pikiran. Tetapi sebenarnya di dalam masyarakat pedesaan terdapat bermacam-macam gejala social yang

sering timbul. Gejala-gejala sosial itu sering diistilahkan :

- a. Konflik. Karena hampir setiap hari dari mereka yang selalu berdekatan dengan tetangganya secara terus-menerus dan hal ini menyebabkan kesempatan untuk bertengkar sangat banyak. Pertengkar-pertengkar yang terjadi biasanya berkisar pada masalah sehari-hari rumah tangga dan sering menjalar keluar rumah tangga, sedangkan sumber banyak pertengkar itu rupa-rupanya berkisar pada masalah kedudukan dan gengsi, perkawinan dan sebagainya.
- b. Kontroversi (pertentangan) pertentangan ini biasanya disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan (adat-istiadat), psikologis atau dalam hubungannya dengan guna-guna (blackmagic), para ahli hukum adat biasanya meninjau masalah kontroversi (pertentangan) ini dari sudut kebiasaan masyarakat.
- c. Kompetisi (persaingan) wujud persaingan bisa positif dan juga bisa negatif. Positif bila persaingan wujudnya saling meningkatkan, usaha untuk meningkatkan prestasi dan produksi atau output (hasil). Sebaliknya yang negatif, bila persaingan ini hanya berhenti pada sifat iri, yang tidak mau berusaha sehingga kadang-kadang hanya melancarkan fitnah-fitnah saja.

Sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Yang biasa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan pendirinya adalah kepandaian, tingkat umur (yang senior), sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala desa dan

mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu.

Alasan-alasan yang dipakai berlainan bagi tiap-tiap masyarakat. Pada masyarakat yang hidupnya dari berburu hewan alasan utama adalah kepandaian berburu. Sedangkan pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, maka kerabat pembuka tanah (yang dianggap asli) dianggap sebagai orang-orang yang menduduki lapisan tinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat Batak, dimana marga tanah, yaitu marga yang pertama-tama membu katanah, dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi karena mereka dianggap sebagai pembuka tanah dan pendiri desa yang bersangkutan. Lain halnya dengan masyarakat yang menganggap bahwa kerabat kepala masyarakatlah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

Secara teoritis, semua manusia dianggap sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial tidaklah demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian system social setiap masyarakat. Adapun ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat kedalam suatu masyarakat adalah sebagai berikut: (1)Ukuran kekayaan, yaitu barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka termasuk dalam lapisan paling atas, kekayaan tersebut misalnya adapat dilihat pada bentuk rumah, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barangmahal dan seterusnya. (2)

Ukuran kekuasaan, yaitu barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar maka ia menempati lapisan atas. (3) Ukuran

kehormatan, ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran –ukuran kekayaan dan atau kekuasaan, orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang terbatas. (4) Ukuran ilmu penegetahuan, ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Hal yangdemikian memacu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut walaupun dengan usaha yang tidak halal.

Ukuran diatas tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran– ukuran diatas amat menentukan sebagai dasar timbulnya system pelapisan sosial dalam suatu masyarakat.

Problematika Pembangunan Masyarakat Desa

W. Brand menulis Negara-negara yang sedang berkembang miskin karena: (1) Produktivitas tanahnya rendah. (2) Kekurangan modal, taraf pendidikannya rendah. (3) Kekurangan kepemimpinan untuk mendorong kemajuan ekonomi. (4) Di Indonesia dapat ditambahkan dengan kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa.

Pada umumnya negara-negara yang merdeka pada pertengahan abad 20 dan kemudian berusaha untuk berkembang maju banyak menemukan kesulitan. Diantaranya, mental kita masyarakat pada umumnya adalah masyarakat yang baru lepas dari kungkungan, deraan dan pemerkosaan mental dan tekanan-tekanan yang dilakukan penjajah. (1) Mental feodalistis melahirkan kultur individu memuja dan memuji serta mengagung-

agungkan pemimpin. (2) Mental kita lainnya adalah karena hidup berorientasi dunia barat. (3) dan mental kita hidup boros.

Pendidikan Kunci Pembangunan masyarakat

Dasar keberhasilan program pembangunan masyarakat desa adalah para petugas memahami bagaimana melaksanakan metode-metode pendidikan extension dimana-mereka adalah sebagai administator, specialist teknik ataupun sebagai pengawas. Extension adalah pendidikan yang tujuannya merubah sikap dan praktek tingkah laku orang-orang desa.

Didalam memahami pandangan hidup masyarakat desa petugas-petugas jawatan yang bergerak dalam bidang pendidikan harus memusatkan pemahamannya kepada alam pikiran masyarakat desa. Pendidikan sosial pada mulanya harus memusatkan kegiatannya kepada membimbing para petugas untuk memahami cara berfikir orang-orang desa dan mengetahui mengapa demikian. serta memaharni ekspresinya dan juga memahami sikap mereka terhadap cara-cara hidup dan melangsungkan hidup pada saat sekarang.

Metode Pembangunan Masyarakat Desa

Metode pembangunan masyarakat adalah alat-alat petugas dalam mendekati pekerja dengan mempengaruhi orang-orang desa agar menjadi tertarik dan kemudian mempunyai pengalaman-pengalaman yang berhasil dalam memecahkan masalah-masalah mereka melalui usaha-usaha mereka sendiri. Dengan menggunakan petunjuk-petunjuk dan sumber-sumber teknis pemerintah. Metode-metode tersebut diantaranya : (1) Metode kontak langsung. (2) Demonstrasi hasil. (3) Demonstrasi metode. (4) Bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin desa. (5) Aksi

kelompok. (6) Alat peraga. (7) Karyawisata. (8) Nyanyian, reog dan lain-lain. (9) Pusat penerangan. (10) Paksaan sosial.

Setelah suatu desa didominasi oleh suatu situasi keagamaan dimana setiap perayaan, setiap mesjid telah diisi oleh orang-orang yang bersembahyang, pengajian anak-anak telah berlangsung tiap sore, madrasah telah ada, maka para kader da'wahpun bergerak meningkatkan situasi dengan mengadakan pengajian kelompok, melalui jangka waktu tertentu, maka pengajian kelompok tersebut akan melahirkan orang-orang yang mampu memberikan pengajaran kepada anak istrinya atau orang lain.

Sasaran dan Proses

1. Sasaran Dan Proses

Petunjuk untuk mengadakan diagnosa dalam menentukan problema masyarakat, untuk melakukan diagnosa dan perumusan problem-problem desa diperlukan 3 step : pertama, problem-problem desa-desa itu secara sendiri-sendiri dirumuskan. kedua hal-hal yang menyebabkan timbulnya problem itu harus diketahui, ketiga step untuk aksi (tindak usaha) direkomendasikan untuk memecahkan setiap problem. Hal ini merupakan proses essensial supaya orang-orang desa meneliti keadaan diri mereka sendiri dan banya merupakan dasar\ dimana orang-orang dapat mengambil keputusan yang intelegent tentang apa yang mereka perbuat, kapan akan dilakukan, bagaimanan mereka mengerjakannya, dan siapa yang mengambil inisiatif.

2. Peranan Organisasi dan Lembaga Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Desa yang tidak memiliki organisasi dan lembaga tidaklah dapat berfikir, berencana dan bertindak sebagai suatu unit desa. Petugas yang gagal menumbuhkan benih dan pemeliharanya kearah terwujudnya

organisasi ataupun kelompok akan kehilangan kesempatan yang sangat baik dan bermanfaat untuk menolong orang-orang memperoleh pengalaman mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dibawah bimbingan para pemimpinnya dan dengan bekerja melalui organisasi-organisasi mereka sendiri.

Tak dapatlah disangkal bahwa pedesaan itu terdapat banyak pengelompokan secara sukarela terbentuk dengan sendirinya. Organisasi sukarela demikian dapatlah diharapkan untuk bertanggung jawab dalam jenis kegiatan tertentu yang penting bagi keseimbangan pembangunan. Makin besar pelaksanaan yang dipercayakan kepadanya, akan lebih intensiflah usaha-usaha kelompok atau organisasi itu.

3. Gotong Royong Dalam Pembangunan

"Bergotong royonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah bergolong royong dalam berbuat dosa dan permusuhan " (Al maidah : 2).

Perencanaan dan kerjasama atau gotong royong untuk memecahkan berbagai macam problema, maka mereka akan memperoleh pengalaman bahwa dengan bergotong royong itu akan dapat menggarap hal-hal yang lebih banyak dan lebih efektif daripada cara perseorangan. Hal yang perlu sekarang adalah menolong orang-orang desa itu untuk belajar memperoleh pengalaman yang berhasil dalam kerja bergotong royong untuk pembangunan.

4. Menjadikan sebagai Pusat Masyarakat

Pada pembangunan pedesaan dimasa yang akan datang harus menjadikan sekolah pedesaan sebagai pusat vital bagi pendidikan masyarakat. Dewasa ini sekolah-sekolah pedesaan belum mampu melaksanakan peranan yang lebih luas tersebut yaitu

membimbing pertumbuhan pendidikan total, hal ini merupakan salah satu dari problema-problema pedesaan yang hanya program pembangunan masyarakat pedesaan-lah yang mampu memecahkannya.

Meninjau problema sekolah pedesaan dari segi pendidikan, ditemukan kenyataan bahwa guru-guru di pedesaan itu kurang terlatih, gajinya kecil, rumahnya buruk, dan dipandang sebagai golongan tingkat dua di dalam masyarakat desa. Jadi, jika sekolah pedesaan itu akan dijadikan lembaga pedesaan yang efektif, mampu melaksanakan peranan penting dalam pembangunan masyarakat desa, maka guru-guru desa itu harus segera menjadi guru-guru yang terlatih, gajinya yang mencukupi, rumahnya yang baik dan berada dalam posisi yang dihargai oleh masyarakat.

Diantara hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka memajukan program pendidikan yang baik adalah sebagai berikut : (1) Memberikan penghargaan dan penghormatan kepada guru. (2) Membangun gedung sekolah. (3) Membangun rumah untuk tenaga pengajar. (4) Menyediakan sebidang tanah untuk seorang guru sehingga bias memiliki sebidang kebun sayur. (5) Memberikan bantuan berupa honorarium dari persatuan orang tua murid atau pun dari pemerintah desa yang diperoleh sebagian dari pajak atau produksi tanah bengkok.

Dimensi Perubahan Sosial dan Budaya

Dimensi perubahan sosial menurut Himes dan Moore. Ada tiga macam, yaitu, dimensi struktural, kultural, dan dimensi interaksional. Dimensi struktural mengacu kepada perubahan-perubahan bentuk struktur masyarakat, perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial, atau dapat dijelaskan secara lebih praktis

perubahan struktural meliputi; bertambah atau berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, adanya peningkatan atau penurunan jumlah peranan atau pengkategorian peranan, terjadinya pergeseran wadah atau kategori peranan, terjadinya modifikasi saluran komunikasi diantara peranan-peranan atau kategori peranan, terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur. Adapun dimensi kultural dalam perubahan mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (*discovery*), kemajuan berpikir dalam ilmu pengetahuan (*science*), pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan (*cultural borrowing*). Kesemuanya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru dalam kebudayaan, bentuk-bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodifikasi secara terus-menerus. Inovasi, difusi, dan integrasi kebudayaan melibatkan proses perubahan sosial dalam dimensi kultural. Inovasi kebudayaan melahirkan penemuan, peniruan, atau peminjaman alat-alat, difusi dikategorikan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan kebudayaan dan difusi secara benar, sedangkan integrasi meliputi, penolakan atau penerimaan terhadap bentuk-bentuk baru, duplikasi, cara hidup lama dan baru secara bersama-sama dan terpola, penggantian bentuk-bentuk lama dengan bentuk-bentuk yang baru.

Perubahan sosial menurut dimensi interaksional mengacu kepada perubahan sosial di dalam masyarakat, yang diidentifikasi dalam lima dimensi, yaitu; *pertama*, perubahan dalam frekuensi, seperti; frekuensinya,

jumlah atau kontinuitas sampai pada hal-hal yang bertentangan. *Kedua*, perubahan dalam jarak sosial, seperti; hubungan intim, hubungan formal dan informal, dan perubahan dalam arah yang berlawanan. *Ketiga*, perubahan perantaraan (saluran) seperti; perlakuan partisipan di dalam suatu hubungan mempribadi sebagai tujuan akhir, berubah maknanya menjadi impersonal atau perubahan yang arahnya bertentangan. *Keempat*, perubahan dari aturan atau pola-pola, seperti; hubungan antara status yang sama dengan arah yang horisontal menjadi pergaulan status yang tidak sama dan arah hubungannya vertikal atau berubah dalam arah berlawanan. *Kelima*, perubahan dalam bentuk, seperti dari pola hubungan solidaritas atau sama-sama, meskipun perangkat struktur lengkap, maka akan terpecah melalui sikap pengalaman yang bermusuhan, persaingan dan konflik, atau berubah dalam arah berlawanan.

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat terdiri dari dua bentuk, yaitu perubahan dari dalam dan perubahan dari luar (soekanto,1999). Perubahan dari dalam meliputi aspek demografi (bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk), penemuan-penemuan baru (*inovasi*), pertentangan atau konflik dan pemberontakan atau revolusi. Faktor demografi yang berhubungan dengan kelahiran dan kematian penduduk, migrasi akan berpengaruh langsung terhadap struktur masyarakat terutama lembaga kemasyarakatannya. Pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut adanya pengaturan kelembagaan agar terjadi tertib sosial, perpindahan penduduk akibat migrasi akan menyebabkan perubahan sistem kelembagaan sosial dalam bentuk lembaga kemasyarakatan yang baru.

Faktor dari luar (*external*) yang mendorong terjadinya perubahan masyarakat adalah adanya penetrasi kebudayaan dari luar, sehingga terjadi

penyerapan budaya baik melalui interaksi sosial kemasyarakatan, dari pemerintah (penguasa) maupun pengaruh teknologi. Benturan kebudayaan seringkali terjadi jika terdapat dua kebudayaan yang bertemu, dalam prosesnya kemudian muncul peniruan atau imitasi budaya, misalnya dalam mode, *life style*, dan lain-lainnya. Faktor lain penyebab terjadinya proses perubahan ialah, terjadinya peperangan dan invasi atau penaklukan dalam suatu daerah kekuasaan, yang terjadi kemudian adalah sang pemenang akan memaksakan kebudayaannya kepada daerah taklukan, misalnya dalam aturan pemerintahan, lembaga sosial kemasyarakatan, tata nilai dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hanapiah Muhi, 2011. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat
- Dadang Juliantara. 2000. *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: LAPERA Pustaka utama
- Long, N. 1992. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- M. Cholil Mansyur. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional
- M. Munandar Soelaiman, 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ndraha, T. 1982. *Metodologi pembangunan Desa*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Ndraha, T. 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Purwo Santoso, 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Celeban Timur Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wiriatmadja, Soekandar, 1973..*Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: CV Yasaguna.